

Proklamasi 17 agustus 1945: tonggak penegakan hak bangsa indonesia atas kemerdekaan

Dwi Sugiarti¹, Rizma Dwi Puspita Ria², Ima Salsabillah³

Progam Studi IPS, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 230102110001@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

penjajahan, perlawanan, kemerdekaan, VOC, pergerakan, penderitaan, Indonesia

Keywords:

Colonization, resistance, independence, VOC, movement, suffering, Indonesia

ABSTRAK

Penjajahan bangsa Indonesia dimulai dengan kedatangan bangsa Eropa, terutama Portugis dan Belanda, yang berujung pada pendirian VOC (Verenigde Oostindische Compagnie) pada tahun 1602. VOC menerapkan sistem monopoli perdagangan dan kerja paksa yang menindas rakyat Indonesia. Belanda juga menggunakan kekuatan militer untuk mengatasi perlawanan-perlawanan yang muncul, seperti Perang Diponegoro (1825-1830) dan Perang Aceh (1873-1904). Pada abad ke-20, muncul gerakan-gerakan kebangsaan yang lebih terorganisir, seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Partai Nasional Indonesia (PNI), yang berperan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pendudukan Jepang pada tahun 1942 juga membawa penderitaan bagi rakyat Indonesia, namun juga memberikan kesempatan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia melalui pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan telah berlangsung lama dan menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan bangsa.

ABSTRACT

The colonization of Indonesia began with the arrival of Europeans, especially the Portuguese and the Dutch, which led to the establishment of the VOC (Verenigde Oostindische Compagnie) in 1602. The VOC implemented a system of trade monopoly and forced labor that oppressed the Indonesian people. The Dutch also used military force to overcome the resistance that emerged, such as the Diponegoro War (1825-1830) and the Aceh War (1873-1904). In the 20th century, more organized national movements emerged, such as Budi Utomo, Sarekat Islam, and the Indonesian National Party (PNI), which played an important role in fighting for Indonesian independence. The Japanese occupation in 1942 also brought suffering to the Indonesian people, but also provided an opportunity to prepare for Indonesian independence through the establishment of the Investigating Agency for Preparatory Work for Indonesian Independence (BPUPKI). The Indonesian people's resistance to colonialism has been going on for a long time and is an important part of the history of the nation's struggle.

Pendahuluan

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 merupakan peristiwa monumental dalam sejarah bangsa. Tindakan ini menandai lahirnya negara Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Dalam konteks sejarah nasional dan hak asasi, proklamasi bukan sekadar pernyataan kemerdekaan, tetapi juga bentuk penegakan hak bangsa untuk menentukan nasib sendiri setelah mengalami penjajahan selama berabad-abad. Momentum ini menjadi puncak dari perjuangan panjang rakyat Indonesia yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan harta demi kemerdekaan.



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Proklamasi menjadi simbol tekad bulat bangsa untuk melepaskan diri dari belenggu kolonialisme dan menjadi subjek yang utuh dalam tatanan dunia internasional. Dengan menyuarakan kemerdekaan secara terbuka, Indonesia menunjukkan bahwa setiap bangsa memiliki hak kodrati untuk hidup bebas, bermartabat, dan membentuk sistem pemerintahan sendiri. Lebih dari sekadar dokumen sejarah, Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah wujud konkret dari semangat nasionalisme dan kebangkitan identitas bangsa. Di tengah situasi global yang masih dipenuhi konflik dan dominasi kekuatan kolonial, keberanian Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya menjadi tonggak penting dalam gerakan dekolonialisasi dunia. Ia membuktikan bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah dari penjajah, melainkan hasil perjuangan kolektif yang lahir dari kesadaran dan tekad rakyatnya sendiri. Oleh karena itu, memahami makna dan nilai dari proklamasi ini sangat penting, bukan hanya dalam rangka mengenang sejarah, tetapi juga sebagai inspirasi dalam membangun masa depan bangsa. Semangat perjuangan, kemandirian, dan keberanian dalam menegakkan hak—itulah warisan tak ternilai yang ditinggalkan oleh para pendiri bangsa dalam satu momen bersejarah: Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Pembahasan

Penjajahan Bangsa Indonesia

Awal mula kedatangan Belanda

Portugis pertama kali mendarat di Nusantara tepatnya di Maluku (Tidore) pada tahun 1522 yang dipimpin oleh Sebastian del Cano. Kemudian pada tahun 1596 bangsa Belanda yang dipimpin oleh Cornelis De Houtman tiba di pelabuhan Banten. Inilah awal kedatangan bangsa Belanda di Nusantara, namun kedatangan Belanda ini akhirnya diusir oleh penduduk pesisir Banten karena sikap mereka yang kasar dan sombong. Pada tahun 1598 bangsa Belanda datang lagi ke Nusantara yang dipimpin oleh Jacob Van Neck dan Wybrecht Van Waerwyck. Tiba di kepulauan Maluku pada bulan Maret 1599. Keberhasilan pelayaran tersebut mendorong keinginan berbagai perusahaan di Belanda untuk memberangkatkan kapalnya ke Indonesia ada 14 perusahaan yang telah memberangkatkan 62 kapal. Semakin banyaknya para pedagang Belanda di Indonesia mengakibatkan antar mereka terjadi persaingan. Selain itu mereka pun harus menghadapi persaingan dengan Portugis, Spanyol dan Inggris. Atas kondisi tersebut, bukan keuntungan yang mereka peroleh, melainkan kerugian. Terlebih lagi dengan sering terjadinya perampokan oleh bajak laut. Atas prakarsa dari pangeran Maurits dan Johan Van Olden Barneveldt, pada 20 Maret 1602, para pedagang Belanda Mendirikan Verenigde Oost Indische Compagnie – VOC (Persekutuan Maskapai Perdagangan Hindia Timur). Di masa itu, terjadi persaingan sengit di antara Negara-negara Eropa, yaitu Portugis, Spanyol kemudian juga Inggris, Perancis, dan Belanda, untuk memperebutkan hegemoni perdagangan di Asia Timur. (Daulay, n.d.)

Setelah Portugis, bangsa Belanda melalui VOC (Verenigde Oostindische Compagnie) mulai menguasai sebagian besar wilayah Indonesia pada abad ke-17. VOC didirikan pada tahun 1602 dengan tujuan menguasai perdagangan rempah-rempah dan memperoleh keuntungan ekonomi dari wilayah Asia, termasuk Indonesia. VOC mengatur dan

mengontrol perdagangan, serta memaksakan monopoli atas produk-produk seperti lada, cengkih, dan pala. Dalam menjalankan bisnis kolonialnya, VOC menggunakan sistem kerja paksa dan tanam paksa yang sangat menindas rakyat Indonesia. Sistem Tanam Paksa yang diterapkan oleh Belanda pada abad ke-19, terutama di Jawa, memaksa petani untuk menanam komoditas tertentu yang harus diserahkan kepada pemerintah kolonial, seperti kopi, tebu, dan nila. Sistem ini menindas petani dan menyebabkan penderitaan besar karena mereka harus menyerahkan sebagian besar hasil pertanian mereka kepada Belanda, sementara mereka sendiri hidup dalam kemiskinan. Selain itu, kerja paksa atau *cultuurstelsel* juga diterapkan di mana rakyat dipaksa bekerja di perkebunan atau proyek-proyek infrastruktur yang dikelola oleh pemerintah kolonial. Hal ini semakin menambah beban hidup rakyat Indonesia yang terjepit dalam penindasan ekonomi dan sosial. Belanda juga menggunakan kekuatan militer untuk mengatasi perlawanan-perlawanan yang muncul dari rakyat Indonesia. Perang Diponegoro (1825–1830), yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro di Jawa, adalah salah satu contoh perlawanan terbesar terhadap penjajahan Belanda. Meskipun perlawanan ini akhirnya berhasil dipadamkan oleh Belanda, semangat perlawanan bangsa Indonesia tidak pernah padam. Begitu juga dengan Perang Aceh (1873–1904), yang berlangsung lebih dari 30 tahun dan menjadi simbol keberanian rakyat Aceh dalam mempertahankan kemerdekaannya dari penjajahan Belanda. (Ika Purnamasari et al., 2024)

Pendudukan Jepang

Pada awal Perang Dunia II, Indonesia yang sebelumnya dijajah oleh Belanda, jatuh ke tangan Jepang pada tahun 1942. Jepang datang dengan klaim untuk membebaskan negara-negara Asia dari penjajahan Barat, namun kenyataannya, pendudukan Jepang di Indonesia justru membawa penderitaan baru bagi rakyat Indonesia. Jepang menerapkan kebijakan yang keras dan otoriter. Meskipun pada awalnya ada segelintir kalangan yang menyambut kedatangan Jepang dengan harapan akan memperoleh kemerdekaan, kenyataannya Jepang lebih brutal dalam menindas rakyat Indonesia.

Jepang menerapkan romusha (kerja paksa) untuk membangun infrastruktur militer mereka di wilayah Indonesia. Rakyat Indonesia dipaksa untuk bekerja di bawah kondisi yang sangat buruk, yang menyebabkan banyak korban jiwa. Selain itu, Jepang mengekang kebebasan politik dan melarang pergerakan nasionalisme yang mulai tumbuh. Selama masa pendudukan Jepang, kebebasan berpendapat dan berkumpul hampir tidak ada, dan banyak tokoh pergerakan kemerdekaan yang dipenjara atau diawasi ketat. Namun, meskipun Jepang menekan kebebasan rakyat Indonesia, mereka juga memberikan sedikit ruang untuk organisasi kemerdekaan Indonesia. Dalam beberapa kasus, Jepang memberikan pelatihan militer kepada pemuda Indonesia, yang kemudian berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan. Lebih jauh lagi, kehadiran Jepang di Indonesia turut mempercepat proses kebangkitan nasionalisme Indonesia. Pada 9 Maret 1945, Jepang akhirnya memberikan kesempatan untuk mendirikan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang berfungsi untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. (Absiroh et al., n.d.)

Perlawanan bangsa Indonesia terhadap para Penjajah

Sejak awal kedatangan bangsa Eropa, rakyat Indonesia sudah menunjukkan perlawanan terhadap penjajahan. Perlawanan tersebut tidak hanya terbatas pada pertempuran bersenjata, tetapi juga dalam bentuk perjuangan melalui organisasi sosial-politik yang muncul pada awal abad ke-20. Berikut adalah beberapa contoh penting dari perlawanan rakyat Indonesia yang menjadi bagian dari sejarah perjuangan bangsa.(Ardiansah, n.d.)

Perang Diponegoro (1825–1830):

Salah satu perlawanan terbesar terhadap Belanda adalah Perang Diponegoro, yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah. Perang ini bermula dari ketidakpuasan terhadap kebijakan Belanda yang semakin menindas rakyat Indonesia, terutama petani yang diwajibkan menanggung beban pajak yang sangat berat. Perang ini berlangsung selama lima tahun dan meskipun akhirnya dimenangkan oleh Belanda, perjuangan Diponegoro menjadi simbol semangat perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan.

Perang Aceh (1873–1904):

Perang Aceh adalah perang panjang yang berlangsung lebih dari 30 tahun antara Belanda dan rakyat Aceh. Meskipun Belanda akhirnya berhasil menguasai Aceh, perang ini menunjukkan tekad dan keberanian rakyat Aceh dalam mempertahankan tanah air mereka dari penjajahan Belanda.

Gerakan Kebangsaan Awal Abad ke-20:

Pada awal abad ke-20, muncul gerakan-gerakan kebangsaan yang lebih terorganisir dan luas. Budi Utomo yang didirikan pada 1908 adalah organisasi pertama yang mengedepankan kesadaran nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, muncul organisasi seperti Sarekat Islam yang lebih fokus pada perjuangan ekonomi dan sosial rakyat, serta Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dipimpin oleh Soekarno dan mengusung semangat nasionalisme untuk mencapai kemerdekaan. Melalui organisasi-organisasi ini, semangat kebangsaan Indonesia semakin berkembang, dan gerakan-gerakan perlawanan yang awalnya bersifat sporadis mulai berubah menjadi pergerakan yang terorganisir. Organisasi-organisasi ini juga berperan penting dalam menyebarkan ide-ide kemerdekaan dan menggalang dukungan dari berbagai lapisan masyarakat Indonesia.

Proklamasi sebagai puncak perjuangan

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan klimaks dari perjalanan panjang perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan dan menegakkan kedaulatan. Peristiwa ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui rangkaian proses yang kompleks dan melibatkan berbagai elemen bangsa. Setelah Jepang menyatakan menyerah kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945, terciptalah kekosongan kekuasaan di wilayah Indonesia. Momentum ini dimanfaatkan oleh para tokoh pergerakan kemerdekaan untuk segera mewujudkan cita-cita bangsa. Kelompok pemuda, yang terdiri dari aktivis nasionalis muda, mendesak agar proklamasi dilakukan sesegera mungkin tanpa menunggu persetujuan dari Jepang. Desakan ini berpuncak pada peristiwa Rengasdengklok, di mana Soekarno dan Hatta 'diculik' oleh para pemuda

agar menjauh dari pengaruh Jepang dan segera menyatakan kemerdekaan. Para pemuda khawatir jika terjadi penundaan, peluang untuk merdeka akan hilang karena kedatangan kembali pihak Sekutu atau bahkan Belanda. (Febrianti, n.d.)

Sebelum peristiwa proklamasi terjadi, telah dibentuk dua lembaga penting oleh pemerintah Jepang, yakni BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Walaupun kedua lembaga ini dibentuk atas inisiatif Jepang, tokoh-tokoh Indonesia yang tergabung di dalamnya menggunakan kesempatan tersebut untuk merumuskan dasar negara dan menyiapkan struktur negara merdeka. Dalam sidang BPUPKI yang berlangsung pada Mei-Juni 1945, lahirlah gagasan-gagasan penting tentang dasar negara, termasuk Pancasila yang dikemukakan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945. Selanjutnya, PPKI sebagai kelanjutan dari BPUPKI, melanjutkan proses persiapan teknis kemerdekaan, termasuk menyusun konstitusi dan memilih pemimpin negara. Meskipun dibentuk oleh Jepang, kedua lembaga ini justru menjadi wadah perjuangan yang dimanfaatkan secara cerdas oleh tokoh-tokoh bangsa dalam menyiapkan kemerdekaan secara sistematis dan berdaulat. (Febrianti, n.d.)

Akhirnya, pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta, Soekarno dan Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan. Tindakan ini dilakukan secara sepihak tanpa meminta restu dari Jepang ataupun Sekutu, yang menunjukkan keberanian dan tekad bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Proklamasi tersebut menjadi titik balik yang menandai lahirnya negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan berdiri di atas kekuatannya sendiri. Dengan demikian, Proklamasi 17 Agustus bukan hanya merupakan momen simbolis, melainkan juga puncak dari perjuangan panjang, pengorbanan besar, serta strategi diplomatik dan politik yang dilakukan oleh berbagai elemen bangsa untuk mewujudkan kemerdekaan yang sejati. (Rinardi, n.d.)

Makna Proklamasi dalam Konteks Hak Bangsa

Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan perwujudan dari hak fundamental setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Hak ini diakui secara universal dalam prinsip-prinsip hukum internasional, seperti yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui proklamasi pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menyatakan secara tegas bahwa mereka tidak lagi ingin hidup di bawah penjajahan dan berhak menentukan arah masa depannya secara mandiri. Dengan demikian, proklamasi menjadi bukti nyata bahwa bangsa Indonesia telah menggunakan hak tersebut untuk membebaskan diri dari belenggu kolonialisme. Proklamasi juga memiliki makna penting sebagai simbol kedaulatan negara Indonesia. Dengan menyatakan kemerdekaannya, Indonesia secara resmi memutuskan hubungan dengan kekuasaan asing yang sebelumnya menjajah. Sejak saat itu, Indonesia berdiri sebagai negara yang bebas dan berdaulat, dengan hak penuh untuk mengatur urusan dalam negeri dan kebijakan luar negerinya sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Proklamasi menjadi tonggak awal berdirinya sistem pemerintahan yang independen dan menjadi dasar legitimasi bagi lahirnya negara Indonesia di mata dunia.

Selain sebagai bentuk pembebasan dan kedaulatan, proklamasi juga memiliki makna penting dalam memperkuat identitas bangsa. Momen proklamasi menjadi titik penyatuan berbagai suku, budaya, dan wilayah di Nusantara ke dalam satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Rasa persatuan dan semangat kebangsaan semakin tumbuh kuat setelah proklamasi dikumandangkan, karena seluruh rakyat Indonesia menyadari bahwa mereka adalah bagian dari satu bangsa yang merdeka. Identitas sebagai bangsa Indonesia pun semakin kokoh dan menjadi landasan bagi perjuangan selanjutnya dalam membangun negara yang merdeka dan berdaulat.

Dampak Kemerdekaan Terhadap Indonesia

Bidang Politik dan Ketatanegaraan:

1. Kedaulatan dan Penentuan Nasib Sendiri: Kemerdekaan memungkinkan Indonesia untuk menentukan arah politik dan kebijakan negaranya sendiri tanpa campur tangan pihak asing. Bangsa Indonesia berhak untuk membuat undang-undang, memilih pemimpin, dan menjalin hubungan internasional secara mandiri.
2. Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI): Kemerdekaan menjadi landasan bagi pembentukan NKRI dengan sistem pemerintahan yang berdaulat dan diakui oleh dunia internasional.
3. Pembentukan Lembaga-Lembaga Negara: Setelah merdeka, Indonesia mulai membentuk lembaga-lembaga negara seperti presiden, parlemen (DPR), kabinet, dan sistem peradilan sendiri.
4. Perubahan Sistem Politik: Sistem politik Indonesia mengalami perubahan dari sistem kolonial yang represif menuju sistem yang lebih demokratis, meskipun prosesnya tidak selalu mulus. Munculnya partai-partai politik menjadi wadah aspirasi rakyat.
5. Pengakuan Internasional: Kemerdekaan membuka jalan bagi Indonesia untuk diakui sebagai negara merdeka oleh negara-negara lain dan menjadi bagian dari komunitas internasional, termasuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Bidang Sosial dan Budaya:

1. Penghapusan Diskriminasi Rasial: Kemerdekaan menghapus segala bentuk diskriminasi rasial yang diterapkan pada masa penjajahan. Semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama.
2. Peningkatan Kesadaran Pendidikan: Kemerdekaan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk memajukan bangsa.
3. Penguatan Identitas Nasional: Kemerdekaan memperkuat rasa persatuan dan kebanggaan terhadap identitas nasional Indonesia yang beragam. Bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan.
4. Kebangkitan Budaya Nasional: Kemerdekaan memberikan ruang bagi kebangkitan dan pengembangan budaya nasional yang sempat tertekan selama masa penjajahan. Nilai-nilai budaya lokal direvitalisasi, dan muncul karya seni serta sastra yang mencerminkan semangat kemerdekaan.

Kesimpulan

Penjajahan bangsa Indonesia telah berlangsung selama berabad-abad, dimulai dari kedatangan bangsa Eropa hingga pendudukan Jepang. Rakyat Indonesia telah menunjukkan perlawanan terhadap penjajahan melalui berbagai bentuk, termasuk pertempuran bersenjata dan perjuangan melalui organisasi sosial-politik. Perlawanan-perlawanan ini telah menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan telah membentuk semangat kebangsaan yang kuat. Melalui perjuangan dan perlawanan ini, Indonesia akhirnya berhasil mencapai kemerdekaannya.

Daftar Pustaka

- Absiroh, U., Isjoni, D., Si, M., Pd, S., & Si, M. (n.d.). *UNDERSTANDING OF HISTORY 350 YEARS INDONESIA COLONIZED BY DUTCH*.
- Anwar, U. A. A., & Pustaka, D. (2025). *Hak dan Kewajiban: Pilar Demokrasi Indonesia*. Detak Pustaka.
- Ardiansah. (n.d.). *ANALISIS SEJARAH KEBENARAN INDONESIA DALAM PENJAJAHAN BELANDA SELAMA 350 TAHUN*.
- Daulay, S. (n.d.). *PERGUMULAN ISLAM INDONESIA DENGAN KOLONIALISME ABAD KE 18 DAN 19*.
- Febrianti, B. (n.d.). *PERISTIWA RENGASDENGKLOK MENJADI PEMBUKA KEMERDEKAAN INDONESIA*. <https://doi.org/10.22437/jejak.v4i2.28255>
- Ika Purnamasari, Tappil Rambe, Juni Elfi Br Purba, Dwi Adinda, & Muhammad Waldano. (2024). Perang Aceh Perlawanan terhadap Kolonialisasi Belanda Aceh War Resistance Against the Colonialization of the Netherlands. *Public Service and Governance Journal*, 5(2), 152–161. <https://doi.org/10.56444/psgj.v5i2.1507>
- Islam, K. H. di Indonesia pada Masa Kemerdekaan. *Hukum Islam Di Indonesia*, 45.
- Nyoto, N., Nyoto, R. L. V., Renaldo, N., & Purnama, I. (2022). Peran Pemuda Mengisi Kemerdekaan Bangsa Melalui Pemantapan Wawasan Kebangsaan. *JUDIKAT: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 65-73.
- Rinardi, H. (n.d.). *PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945: REVOLUSI POLITIK BANGSA INDONESIA*.